

KESIMPULAN

- (1) Komunikasi yang terbangun antara pemerintah Desa Sudagaran dengan masyarakat maupun kepada birokrat khususnya yang mengurus SID dalam hal kejelasan informasi yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, ditunjukkan dengan adanya berbagai macam informasi yang disebarluaskan melalui *website* ataupun media sosial resmi desa lainnya salah satunya di instagram. Desa Sudagaran memiliki *website* resmi desa dan dapat diakses oleh siapa saja yang ingin mengetahui seluruh informasi. Informasi di dalamnya seperti profil desa, pemerintahan desa, data kependudukan, PPID, produk hukum, desa anti korupsi disajikan secara lengkap. Namun, dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan, yaitu tidak semua masyarakat mengetahui bagaimana cara menggunakan *website* terutama yang sudah sesepuh. Adanya beberapa golongan masyarakat yang dikatakan belum siap dengan kemajuan teknologi yang membuat mereka masih terpaku pada sistem pelayanan terdahulu. Sehingga apabila mereka membutuhkan pelayanan publik, mereka akan datang langsung ke kantor desa. Akan tetapi, masyarakat yang telah paham dan melek teknologi merasa sangat terbantu karena mereka bisa merasakan pelayanan yang efektif dan efisien serta bisa dilakukan kapan dan dimana saja. Pemerintah Desa Sudagaran juga telah memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat melalui *website* resmi desa ataupun banner yang dipasang di jalan-jalan. (2) Sumber Daya yang ada di Desa Sudagaran terutama dalam penerapan desa digital saling berkesinambungan. Dapat dibuktikan dengan adanya pelatihan menggunakan komputer yang diadakan oleh Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang ada sehingga mereka semakin mengerti dan paham. Tidak hanya itu, dalam penerapan kebijakan desa digital di Desa Sudagaran sumber daya finansialnya dialokasikan dari APBDes yang digunakan untuk pengembangan, kemudian ketersediaan jaringan, dan untuk biaya perawatan sistem informasinya agar lebih baik. (3) Secara keseluruhan, disposisi pelaksana kebijakan desa digital di Desa Sudagaran menunjukkan kecenderungan positif untuk mendukung

implementasi program. Dalam hal ini, tidak ada kriteria khusus untuk pengangkatan birokrat terutama yang mengurus desa digital. Pengangkatan birokrat hanya dipilih bedasarkan yang paling muda dan paham tentang teknologi. (4) Struktur birokrasi dalam kebijakan desa digital di Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas, mencerminkan sistem yang terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih efektif. Kepemimpinan yang proaktif, kolaborasi antar instansi, serta penerapan sistem informasi yang terintegrasi menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Kemampuan dasar teknologi informasi sangatlah penting dalam implementasi sistem informasi desa sehingga membutuhkan Sumberdaya manusia yang berkompeten dan sesuai dalam bidangnya, Sumberdaya manusia yang mempunyai kemampuan dasar sehingga dapat mengelola Sistem Informasi Desa (SID) seperti memasukan data, menyimpan data dan mengolah data. Sehingga tidak hanya dipilih berdasarkan dari yang paling muda saja.
2. Memberikan anggaran khusus untuk mengembangkan sistem informasi desa.
3. Perlu adanya sosialisasi tambahan kepada masyarakat agar dapat memberi pemahaman kepada masyarakat tentang berbagai keunggulan dan manfaat dalam menggunakan SID.